

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia mempunyai tiga pelaku ekonomi yang menjadi sumber usaha perekonomian nasional di masyarakat, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Dalam mencapai kedudukan perekonomian yang kuat serta mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, maka ketiga pelaku ekonomi tersebut perlu saling bekerja sama. Dari ketiga pelaku ekonomi, koperasi dilihat yang paling cocok dikembangkan di Indonesia karena koperasi sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya yang bersifat kekeluargaan.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 1 ayat (1), sebagai berikut:

"Koperasi adalah suatu badan usaha yang terdiri dari orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas dasas kekeluargaan".

Oleh karena itu, koperasi merupakan sarana penggerak kemajuan perekonomian rakyat yang kegiatannya ditujukan untuk memenuhi kepentingan ekonomi para anggotanya. Tujuan khusus koperasi yaitu untuk meningkatkan

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi dituntut untuk dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, salah satunya yaitu koperasi harus mampu melaksanakan berbagai jenis usaha sesuai kebutuhan anggota dan Masyarakat luas. Tujuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 2 Pasal 3 sebagai berikut:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia”.

Sebagai suatu organisasi, koperasi menjalankan fungsi pengelolaan organisasi, khususnya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Masing-masing fungsi tersebut harus dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang selaras dengan efektivitas organisasi. Efektivitas adalah perbandingan antara hasil dan tujuan yang menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan, sedangkan pengukuran efektif merupakan semacam bentuk pemikiran terhadap produksi. Kinerja kerja dapat dikatakan efektif jika proses setiap kegiatan mencapai tujuan atau sasaran tertinggi dari kebijakan tersebut Ilmawahyu (2021)

Dalam kegiatannya, koperasi tidak hanya bergerak pada sektor jasa seperti simpan pinjam, namun juga bergerak pada sektor produksi seperti pertanian, peternakan, dan lain-lain. Usaha-usaha ini diharapkan mampu tumbuh dan berkembang sehingga menjamin kesejahteraan masing-masing anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk kegiatan usaha yang bersifat *service*-

oriented, dalam menjalankan usahanya koperasi harus fleksibel, dalam arti, ketika berhadapan dengan para anggota, mekanisme layanan harus berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi dengan penekanan. Koperasi harus mempunyai kemampuan untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam memperoleh laba penjualan yang optimal, karena dalam struktur organisasi koperasi, pelaksanaan kinerja perusahaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen koperasi (manajer dan karyawan). Harus diakui bahwa koperasi dapat berkembang sesuai harapan maka pengelolaan koperasi juga harus baik. Artinya koperasi tidak bisa berdiri tanpa adanya pengelolaan yang baik dan sehat. Koperasi dituntut melakukan hal tersebut karena pandangannya bukan hanya sekedar mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong, namun juga menjalankan fungsinya untuk kesejahteraan anggotanya.

Faktor yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai laba (profitabilitas) adalah efektif atau tidaknya dalam mengelola biaya. Apabila tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan berhasil dicapai, maka kinerja perusahaan dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya, suatu bisnis dikatakan tidak efektif jika tujuan bisnis yang direncanakan tidak berhasil. Menurut Makler dalam Stoner dkk. (1994) dalam Ernawati (2000:18), pengendalian adalah upaya sistematis untuk menerapkan standar kerja dengan merancang timbal balik dan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam kinerja aktual dan mengukur dampak penyimpangan ini terhadap penjualan, sehingga penyimpangan dapat diidentifikasi dan diperbaiki.

Menurut Kusumawardani (2007), pengendalian biaya adalah suatu proses yang bermula dari penyusunan rencana biaya dan tindakan yang harus dilakukan jika terdapat perbedaan antara apa yang ditentukan (direncanakan) dan sebenarnya (pencapaian). Tanggung jawab pengendalian biaya terletak pada mereka yang bertanggung jawab menyiapkan anggaran pengendalian biaya. Faktanya, seluruh tanggung jawab organisasi terletak pada manajer. Layanan inilah satu-satunya biaya yang dapat dikendalikan dan kinerja setiap pegawai harus dinilai atau dievaluasi dengan membandingkan biaya sebenarnya dengan biaya yang dianggarkan. Perencanaan laba ini kemudian digunakan sebagai standar atau pedoman untuk dibandingkan dengan pekerjaan yang sebenarnya terjadi. Selain itu, juga digunakan untuk mengidentifikasi, memeriksa, dan menganalisis penyimpangan yang terjadi, serta menentukan tindakan korektif yang diperlukan sebagai tolak ukur kinerja di masa depan.

Tujuan dari entitas bisnis secara umum adalah untuk mengoptimalkan laba guna menjaga keberadaannya secara berkelanjutan. Dalam mencapai tujuannya tidaklah mudah karena di tengah persaingan yang ketat, dan salah satu opsi untuk mengoptimalkan laba adalah dengan meningkatkan penjualan. Dalam sebuah koperasi laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU adalah pendapatan yang diperoleh oleh koperasi dalam satu periode akuntansi setelah dikurangi dengan penyusutan dan biaya dari periode akuntansi yang relevan (Sudarsono, dkk., 2005:112). Laba (SHU) dari sebuah koperasi tidak hanya memiliki peran dan fungsi ekonomi, tetapi juga sosial karena laba yang diperoleh dari usaha yang dilakukan untuk anggota akan didistribusikan untuk dana sosial dalam persentase tertentu.

Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi laba, seperti biaya operasi perlu dipertimbangkan oleh koperasi. Pada intinya, laba dalam sebuah koperasi adalah pendapatan setelah dikurangi dengan biaya (Sudarsono, dkk., 2005:112).

Salah satu koperasi di Jawa Barat yang masih aktif dan beroperasi sampai saat ini adalah Koperasi Konsumen Karya Bersama. Koperasi ini didirikan pada tanggal 16 September 2003. Koperasi Konsumen Karya Bersama telah terdaftar pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kotamadya Bandung dengan Badan Hukum Nomor: AHU—0003392.AH.01.27.Tahun 2021. Koperasi Konsumen Karya Bersama merupakan koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang-seorang, di mana anggotanya adalah karyawan dari PT. Dirgantara Indonesia. Anggota yang tercatat pada tahun 2023 sebanyak 584 orang dengan jumlah pengurus sebanyak 3 orang dan pegawai sebanyak 6 orang.

Koperasi Konsumen karya Bersama ini memiliki 2 unit usaha, di antaranya:

1. Unit usaha Simpan Pinjam

Dalam unit usaha ini anggota menyimpan dan meminjam dana dari koperasi untuk kepentingan masing-masing anggota koperasi.

2. Unit Usaha Perdagangan umum

Unit usaha perdagangan umum menyelenggarakan kegiatan usaha seperti kebutuhan pangan, alat elektronik, jasa pengadaan kendaraan sepeda motor, jasa pengurusan STNK dan jasa fotocopy.

Adapun perkembangan pendapatan, biaya operasi dan SHU pada Koperasi Konsumen Karya Bersama tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Perkembangan Pendapatan, Biaya Operasi dan SHU
Pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan (Rp)	N/T (%)	Biaya Operasi (Rp)	N/T (%)	SHU Bersih (Rp)	N/T (%)
2019	1.215.144.331	-	750.404.438	-	636.224.942	-
2020	1.123.376.946	(7,55)	761.572.659	1,49	527.136.344	(17,15)
2021	962.410.020	(14,33)	786.747.491	3,31	447.366.846	(15,13)
2022	1.148.794.279	19,37	747.452.896	(4,99)	385.918.948	(13,74)
2023	1.062.483.510	(7,51)	774.170.699	3,58	233.508.160	(39,49)

Sumber: *Laporan RAT Koperasi Konsumen Karya Bersama Tahun 2019-2023*

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir pendapatan pada Koperasi Konsumen Karya Bersama mengalami penurunan sepanjang tahun 2019-2021, tetapi mengalami kenaikan sebanyak 19,37% pada tahun 2022. Kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 sebanyak 7,5%. Biaya operasi sendiri mengalami kenaikan sepanjang tahun 2019-2021, tetapi mengalami penurunan di tahun 2022 sebanyak 4,99%. Sedangkan perkembangan pada SHU selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan di setiap tahunnya hingga 39,49% pada tahun 2023.

Besaran SHU yang menurun pada Koperasi Konsumen Karya Bersama dapat diduga karena penggunaan biaya operasi yang belum dikendalikan secara efektif oleh koperasi atau biaya-biaya yang dikeluarkan tinggi atau meningkat dibandingkan dengan pendapatan dari tahun sebelumnya. Menurunnya SHU dapat

berpengaruh pada manfaat ekonomi tidak langsung yaitu berupa pembagian sisa hasil usaha bagian anggota.

Selain manfaat ekonomi tidak langsung yang dirasakan oleh anggota, ada pula manfaat ekonomi langsung yang dirasakan oleh anggota koperasi. Manfaat ekonomi langsung adalah manfaat yang secara langsung didapatkan anggota ketika bertransaksi di koperasi. Misalnya harga jual yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah dibandingkan dengan harga jual di non koperasi. Adapun besarnya tingkat suku bunga simpanan di koperasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga di non koperasi, serta tingkat suku bunga pinjaman di koperasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga pinjaman di non koperasi.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Petty Arsanti (2017) dengan judul “Efektivitas Pengendalian Biaya Operasional Untuk Meningkatkan Laba Pada Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah Dau Kabupaten Malang” menyatakan bahwa adanya pengendalian terhadap biaya operasional Kanindo Syariah Dau Kabupaten Malang karena terjadi pembengkakan, yaitu jumlah gaji karyawan yang terealisasi mengalami kenaikan yang berakibat naiknya total biaya operasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian yang lebih baik lagi dari pihak manajemen Kanindo Syariah dalam penetapan gaji karyawan, yang mana menyesuaikan dengan kondisi keuangan Kanindo agar biaya operasional tidak membengkak yang berakibat pada turunnya SHU.

Dalam penelitian non koperasi, Ernawati (2000) melakukan penelitian tentang “pengendalian biaya operasional dengan menganalisis laporan laba rugi dan standar kerja” menyebutkan bahwa pengendalian yang dilakukan oleh BPR Pulau

Intan Sejahtera tidak memadai, karena pengeluaran aktual melebihi jumlah yang dianggarkan. Hal ini berdampak pada kurangnya peningkatan keuntungan bagi perusahaan, bahkan mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pengendalian seperti perencanaan yang hati-hati, penyusunan anggaran yang rinci, dan pengawasan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa standar kerja yang diterapkan sesuai dengan hasil yang sebenarnya terjadi, dan untuk menunjukkan bahwa pengendalian memiliki dampak signifikan pada perolehan dan optimalisasi keuntungan dalam lembaga ekonomi atau entitas bisnis, termasuk koperasi. Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Hafid, Ahmad R (2007), dengan judul “Peranan Anggaran Biaya Operasi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya Operasi” menyatakan bahwa PT. Kereta Api telah melaksanakan anggaran biaya operasi dengan memadai hal ini terlihat dengan adanya prosedur dan proses penyusunan anggaran biaya operasi yang efektif, adanya tahapan-tahapan untuk mencapai efektivitas pengendalian biaya operasi serta pengujian hipotesis yang mencapai 98,45% yang berarti anggaran biaya operasi berperan dalam menunjang efektivitas biaya operasi dapat diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran biaya operasi yang memadai mempunyai peranan dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya operasi. Sedangkan Rahmad (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pengendalian Biaya Operasional Pada PT. Berkat Jaya Pangestu Medan”, menyatakan bahwa peningkatan biaya operasional disebabkan adanya peningkatan unsur-unsur biaya operasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan adanya inefisiensi biaya operasional dalam menjalankan aktivitas kerjanya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada Koperasi Konsumen Karya Bersama dan diperkuat oleh penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan masalah yang perlu diuji dengan judul **“Efektivitas Pengendalian Biaya Operasi Dalam Meningkatkan Manfaat Ekonomi Anggota”** pada Koperasi Konsumen Karya Bersama Kota Bandung, Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya maka, permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana anggaran dan realisasi dari pendapatan, biaya operasi dan sisa hasil usaha pada Koperasi Konsumen Karya Bersama.
2. Bagaimana manfaat ekonomi anggota pada Koperasi Konsumen Karya Bersama.
3. Sejauh mana efektivitas pengendalian biaya operasi pada Koperasi Konsumen Karya Bersama.
4. Bagaimana upaya dalam meningkatkan manfaat ekonomi anggota dengan mengefektifkan pengendalian biaya operasi pada Koperasi Konsumen Karya Bersama.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pengendalian Biaya Operasi Dalam Meningkatkan Manfaat Ekonomi Anggota Pada Koperasi Konsumen Karya Bersama.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Anggaran dan realisasi dari pendapatan, biaya operasi, dan sisa hasil usaha pada Koperasi Konsumen Karya Bersama.
2. Manfaat ekonomi anggota pada Koperasi Konsumen Karya Bersama.
3. Efektivitas pengendalian biaya operasi dalam meningkatkan manfaat ekonomi anggota pada Koperasi Konsumen Karya Bersama.
4. Upaya dalam meningkatkan manfaat ekonomi anggota dengan mengefektifkan pengendalian biaya operasi pada Koperasi Konsumen Karya Bersama.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu perkoperasian dan manajemen keuangan.
- b. Dapat dijadikan salah satu literatur yang bermanfaat bagi mereka yang mengkaji masalah serupa mengenai efektivitas pengendalian biaya operasi dalam meningkatkan manfaat ekonomi anggota di koperasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi Koperasi Konsumen Karya Bersama sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau masukan guna memecahkan permasalahan, dengan efektivitas pengendalian biaya operasi dalam meningkatkan manfaat ekonomi anggota, sehingga Koperasi Konsumen Karya Bersama dapat mengevaluasi dan memperbaiki kinerja keuangan di masa mendatang.

